

The Effect of Local Government Revenue (PAD), Special Allocation Funds (DAK), Revenue Sharing Funds (DBH), and General Allocation Funds (DAU) on Local Expenditures in the Surabaya City Government

Miftahul Jannah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur

email: miftah.jannah3000@gmail.com

Sri Trisnaningsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur

email: trisna.ak@upnjatim.ac.id

Keywords:

Local Government Revenue, Special allocation fund, Revenue Sharing Fund, General allocation fund, Local Expenditure

Abstract

This study aims to examine and prove the effect of Regional Original Income (PAD), Special Allocation Funds (DAK), Revenue Sharing Funds (DBH), and General Allocation Funds (DAU) on Regional Expenditures in the Surabaya City Government. This study uses a quantitative method. The data used is in the form of secondary data, namely the 2011-2020 budget realization report taken from Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya (BPKAD) and website (<https://www.surabaya.go.id/>). The sampling technique used is a saturated sample. The data analysis technique used was classical assumption test analysis and multiple linear regression analysis. Hypothesis testing using multiple linear regression analysis using the SPSS program with a significance level of 0,05. The results of the partial test show that the PAD variable has a significant effect on Regional Expenditures. While the variables of the DAK, DBH and DAU partially have no effect on Regional Expenditures. In the F (simultaneous) test, the variables of PAD, DAK, DBH and DAU simultaneously affect Regional Expenditures.

Kata Kunci

Kata Kunci:

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah

Abstrak

Studi ini bermaksud guna menguji dan membuktikan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data penelitiannya data sekunder yakni laporan realisasi anggaran periode tahun 2011-2020 yang diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta website (<https://www.surabaya.go.id/>). Teknik penentuan sampelnya dengan sampel jenuh. Data dianalisis dengan analisis uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesisnya dengan analisis regresi linier berganda menggunakan program SPSS dengan dasar tingkat signifikansi sebesar 0,05. Hasil dari pengujian secara parsial mengindikasikan bahwasannya variabel PAD mempengaruhi Belanja Daerah secara signifikan. Sedangkan variabel DAK, DBH dan DAU secara parsial tidak mempengaruhi Belanja Daerah. Sementara secara simultan PAD, DAK, DBH dan DAU mempengaruhi Belanja Daerah.

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan daerah berdampak positif terhadap masyarakat terutama mengenai tentang otonomi daerah. Disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2014, bahwa otonomi daerah yaitu suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri. Peran pada otonomi daerah menekankan adanya pembangunan suatu daerah dan pengelolaan keuangan daerah dan

tujuan adanya sistem otonomi daerah agar pemerintah daerah lebih fleksibel dalam menjalankan pelayanan publik dengan berpacu pada sumber pendapatan daerah yang utama yakni PAD bertujuan guna membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah untuk menunjang kehidupan rakyat. Pada realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya sendiri sudah mencapai target dan adanya peningkatan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya bahwa penerimaan terbesar adalah pada sektor PAD dan Dana

Perimbangan yang termasuk berkontribusi besar kedua dan kontribusi terbesar ketiga adalah Lain-lain Pendapatan Asli yang legal. Untuk sektor belanja daerah sendiri kontribusi belanja langsung melebihi belanja tidak langsung (BPS Surabaya). Namun, ada kendala-kendala yang terjadi pada dipicu pada faktor adanya wabah covid-19 yang membuat penurunan yang cukup signifikan pada pendapatan daerah Kota Surabaya. Penurunan APBD pada sektor PAD dari 5,58 Triliun menjadi 5 Triliun yang turun sebesar 0,543 Triliun (9,73%). Untuk sektor Dana Perimbangan yaitu 2, 26 Triliun yang mengalami penurunan menjadi 242 Miliar. Sedangkan Pendapatan yang Sah lainnya yang mulanya 1, 23 Triliun menjadi 1, 02 Triliun. Belanja Barang dan jasa yang mulanya 4, 12 Triliun menjadi 4, 13 Triliun. Pada belanja langsung mengalami penurunan secara signifikan yakni Belanja Modal. Tahun 2020 APBD Murni dari 3, 08 Triliun turun menjadi 1, 86 Triliun. Dengan demikian, total belanja dari 10,32 Triliun menjadi 8,88 Triliun. (Sumber: Antara News.com)

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Fatimah dkk, 2019) hasil penelitiannya menjelaskan bahwasannya PAD mempengaruhi positif pada Belanja Daerah, DAU mempengaruhi Belanja Daerah, sementara DBH dan DAK tidak mempengaruhi Belanja Daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wati dkk, 2017) hasil penelitiannya menjelaskan bahwasannya PAD dan dana perimbangan mempengaruhi Belanja Daerah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stakeholder

Teori Stakeholder adalah yang mana seluruh pihak dari internal maupun pihak eksternal seperti bagian pemegang saham pada lembaga diluar perusahaan atau yang lain baik bersifa secara langsung ataupun bersifattidak langsung (Hadi, 2014).

2.2 Teori Keagenan

Teori ini menjelaskan hubungan yang terjalin antara pihak psinsipal dan agen yang berkaitan dengan pengelolaan suatu usaha, dimana agen akan bertindak sebagai pihak yang akan menjalankan usaha dari pemilik usaha (principal) (Suwardjono, 2010).

2.3 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwasannya APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Permda dan DPRD, yang dituangkan ke dalam Peraturan Daerah.

2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwasannya PAD yaitu pendapatan Daerah yang pemungutannya disesuaikan dengan Perda dan perundang-undangan. PAD diperuntukkan guna membiayai kegiatan yang diadakan pemerintah untuk kepentingan penduduk setempat.

2.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam UU No. 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan, disebutkan bahwasannya DAK yaitu dana yang diambil dari APBN, dimana pengalokasiannya diperuntukkan guna membiayai keperluan tertentu.

2.6 Dana Bagi Hasil (DBH)

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 bahwa DBH yaitu dana yang diambil dari APBN, yang pengalokasiannya diperuntukkan untuk daerah yang tujuannya guna melaksanakan Desentralisasi.

2.7 Dana Alokasi Umum (DAU)

Disebutkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwasannya pendanaan DAU diambilkan dari APBN yang pengalokasiannya untuk meratakan kemampuan keuangan setiap daerah dalam melaksanakan Desentralisasi.

2.8 Belanja Daerah

Belanja Daerah yakni suatu bentuk pengeluaran keuangan daerah guna membiayai suatu berbagai program di daerah. Permendag No 13 Tahun 2006 pasal 31 ayat (1) bahwasannya belanja daerah ditujukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah, terutama urusan pada bidang tertentu yang pelaksanaannya bersama-sama dengan pemerintah pusat.

Belanja daerah ada dua yakni: 1) Belanja Langsung sesuai Permendag No 21 Tahun 2011, yaitu penganggarnya untuk melaksanakan program, dan untuk belanja Pegawai, Barang dan Jasa, serta Belanja Modal Menurut Permendag adalah suatu belanja yang penganggarnya tidak berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, diantaranya belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan.

2.8.1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

PAD sebagai sumber pendapatan daerah untuk kepentingan daerah. Daerah yang mempunyai Sumber Daya Alam yang potensial dan didukung dengan akomodasi yang memadai juga menentukan produktivitas masyarakatnya yang mana akan menambah pada sektor PAD. Apabila ada peningkatan jumlah PAD maka dana pemerintah daerah juga akan naik, sehingga daerah tersebut akan lebih mandiri secara finansial.

Beberapa penelitian melaporkan bahwasannya PAD mempengaruhi Belanja Daerah (Devita, dkk 2014), (Fatimah, dkk, 2019), (Gani, 2013), (Saputri dkk, 2014), (Rahman dkk, 2007), (Ferdiansyah dkk, 2018), (Masdjojo dkk, 2009), (Liando dkk, 2017), (Rahmawati dkk, 2015), (Iqbal dkk, 2020), (Ernayani, 2017), (Nailufar dkk, 2019) dan (Listiorini, 2012).

H1: PAD mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Daerah

2.8.2 Pengaruh DAK Terhadap Belanja Daerah

Dalam UU No 23 Tahun 2014 disebutkan bahwasannya pendanaan DAK diambilkan dari APBN untuk daerah yang diperuntukkan guna membiayai program yang diprioritas oleh pemerintah pusat, terutama guna mengadakan sarana dan prasarana pelayanan dasar bagi masyarakat.

Penelitian dari beberapa peneliti menunjukkan DAK mempengaruhi Belanja Daerah secara signifikan (Gani, 2013), (Liando dkk, 2017), (Iqbal dkk, 2020) (Ernayani, 2017), (Nailufar dkk, 2019) dan (Laksono dkk, 2014).

2.8.3 Pengaruh DBH Terhadap Belanja Daerah

Disebutkan dalam UU No. 33 2004 bahwasannya DBH merupakan dana yang diambil dari APBN dan diserahkan ke daerah yang diperuntukkan guna membiayai kepentingan daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwasannya DBH mempengaruhi Belanja Daerah secara signifikan (Yulina dkk, 2017), (Masdjojo dkk, 2009), (Liando dkk, 2017), (Mulyati dkk, 2017) dan (Hapid dkk, 2015).

H3: DBH mempengaruhi secara signifikan terhadap Belanja Daerah

2.8.4 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah

Disebutkan dalam UU No 33 Tahun 2004 disebutkan DAU diambilkan dari APBN yang alokasinya diperuntukkan guna pemerataan kemampuan keuangan setiap daerah sebagai upaya Desentralisasi.

Dalam UU No 104 Tahun 2000 dinyatakan bahwasannya DAU diperuntukkan untuk pemerataan yang memperhatikan potensi suatu daerah, agar perbedaan antar daerah dapat diperkecil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya DAU mempengaruhi Belanja Daerah secara signifikan (Fatimah dkk, 2019), (Devita dkk, 2014), (Gani, 2013) (Saputri dkk, 2014), (Rahma dkk, 2007), (Masdjojo dkk, 2009), (Liando dkk, 2017), (Iqbal dkk, 2020),

(Ernayani, 2017), (Mulyati dkk, 2017) dan (Laksono dkk, 2014).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Sumber data

Sumber data penelitiannya data sekunder diambil dari BPKAD Kota Surabaya dan situs (<https://www.surabaya.go.id/>) berupa Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Surabaya periode Tahun 2011-2020.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Prosedur untuk mengumpulkan data dengan mengambil data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2011-2020 mengambil secara langsung melalui Kantor BPKAD Kota Surabaya dan website dari (<https://www.surabaya.go.id/>) pada Laporan Realisasi Anggaran APBD didapatkan data tentang jumlah total PAD, DAK, DBH, DAU dan Belanja Daerah.

3.3 Analisis Data dan Hipotesis

Uji Asumsi Klasik dan Analisis Regresi Berganda digunakan karena pada analisis ini mampu mengukur kekuatan variabel dua atau lebih, dengan bantuan SPSS dan Microsoft Excel 2010, selain itu untuk membuktikan hipotesis dengan melakukan Uji Hipotesis.

Rumus 1. Model Penelitian

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Belanja Daerah

X1 = PAD

X2 = DAK

X3 = DBH

X4 = DAU

α = Konstanta

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Statistik Deskriptif

Dalam tabel 1 diatas pada variabel Belanja Daerah mempunyai nilai minimum sebesar 33,56 yang terjadi ditahun 2011 dan nilai maksimum sebesar 34,45 yang terjadi di tahun 2019. Variabel PAD memiliki nilai minimum 32,87 terjadi di tahun 2011 dan nilai maksimum sebesar 33,92 yang terjadi di tahun 2019. Variabel DAK memiliki nilai minimum yaitu 22,69 yang terjadi di tahun 2015 dan nilai maksimum 26,76 terjadi ditahu 2020. Variabel DBH memiliki nilai minimum sebesar yaitu 26,05 terjadi di tahun 2015 dan nilai maksimum sebesar 26,74 yang terjadi di tahun 2018. Dan pada variabel DAU memiliki nilai minimum yaitu 27,24 yang terjadi di tahun 2011 dan nilai maksimum sebesar 27,86 yang terjadi di tahun 2019.

4.1.2 Uji Normalitas

Pengujian ini dimaksudkan guna mengetahui apakah ada suatu kesalahan pengganggu (residual) yang mempunyai nilai terdistribusi secara normal. Pada uji ini menggunakan OneSampel Kolomogorov-Smirnov Test dengan cara melihat nilai signifikansi residual. Pada uji normalitas apabila nilai sig. > 0,05 maka data terdistribusi normal. Hasil pengujiannya disajikan dalam tabel 2.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BD	10	33.56	34.45	34.0812	.29967
PAD	10	32.87	33.92	33.5232	.35807
DAK	10	22.69	26.76	25.3060	1.51372
DBH	10	26.05	26.74	26.4304	.24643
DAU	10	27.24	27.86	27.7458	.18236
Valid N (listwise)	10				

Sumber: Output SPSS yang diolah

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03702618
Most Extreme Differences	Absolute	.226
	Positive	.226
	Negative	-.206
Test Statistic		.226
Asymp. Sig. (2-tailed)		.159 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS yang diolah

Pada tabel 2 mengindikasikan bahwasannya pada data penelitian ini pada uji normalitas terdistribusi secara normal. Yang mana hasil pengujian One Sample Kolmogrov Smirnov dapat dilihat dari nilai signifikansi pada data yang sudah diolah. Data berdistribusi normal bila nilai signifikansinya > 0,05.

4.1.3 Uji Multikolonieritas

Menurut (Ghazali, 2016) metode VIF guna menerangkan korelasi antara variabel bebas dengan variabel yang lain. Tolerance mampu menunjukkan variasi variabel bebas yang lain. Dalam hal ini, nilai $VIF=1/Tolerance$, dengan ketentuan nilai $Tolerance \leq 0.10$ atau nilai $VIF \geq 10$. Hasil pengujiannya yaitu:

Tabel 3. Uji Multikolonieritas

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	PAD	.378	2.648
	DAK	.116	8.654
	DBH	.170	5.891
	DAU	.388	2.580

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output SPSS yang diolah

Dalam tabel 3 diatas menunjukkan bahwasannya nilai tolerance PAD yaitu 0,378 > 0,10, nilai VIF sebesar 2,648 < 10. Pada DAK nilai tolerancinya yaitu 0,116 > 0,10 dan nilai VIF 8,654 < 10. Pada DBH nilai tolerancinya yaitu 0,170 > 0,10 dan nilai VIF 5,891 < 10. Pada DAU nilai tolerancinya yaitu 0,388 > 0,10 dengan nilai VIF 2,580 < 10.

4.1.4 Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini dimaksudkan guna menguji pada model regresi adanya ketidaksamaan variasi dalam residual antar pengamatannya. Bila variasinya tetap, maka dinamakan Homoskedastisitas, bila berbeda dinamakan heteroskedastisitas. Hasil pengujiannya tersaji dalam tabel 4:

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.229	2.730		-.084	.936
	PAD	.007	.071	.087	.098	.926
	DAK	.011	.027	.585	.404	.703
	DBH	-.032	.165	-.279	-.196	.852
	DAU	.021	.147	.137	.146	.890

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Output SPSS yang diolah

Pada tabel 4 diketahui setiap variabelnya tidak terjadi Heterokedastisitas yang ditunjukkan pada nilai sig. > 0,05, berarti tidak ada Heterokedastisitas.

4.1.5 Uji Autokorelasi

Pengujian ini bertujuan guna melihat adanya korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan periode t-1 (Ghozali, 2016). Pengujiannya dengan Uji Durbin Watson. Hasil pengujian Autokorelasi yaitu:

Tabel 5. Uji Autokorelasi

		Model Summary ^b			
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	
1	.992 ^a	.985	.973	.04968	1.572

a. Predictors: (Constant), DAU, DAK, PAD, DBH

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output SPSS yang diolah

Tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil uji autorelasi dengan nilai durbin Watson 1,572. Dan pada angka hasil Uji Durbin Watson diatas menunjukkan nilainya dikisaran -2 hingga +2, sehingga tidak ada autokorelasi.

4.1.6 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini ditujukan guna melihat arah dan tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018). Hasil pengujiannya yaitu:

Tabel 6. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,267	3,955		2,343	,066
	PAD	,708	,103	,846	6,867	,001
	DAK	,053	,040	,266	1,326	,242
	DBH	-,175	,240	-,144	-,732	,497
	DAU	,158	,213	,096	,741	,492

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output SPSS yang diolah

Dari tabel tersebut didapatkan persamaan regresi ini:

$$Y = 9,267 + 0,708X_1 + 0,053X_2 + 0,175X_3 + 0,158X_4$$

Berdasarkan rumus regresi linier berganda diatas diketahui nilai konstantanya 9,267, yang mengindikasikan jika PAD, DAK, DBH, dan DAU dianggap konstan, maka Belanja Daerah nilainya sebesar 9,267. Yang berarti pada pengujian diatas maka pengujian variabel independen 0, maka diprediksi nilai belanja daerah pada pemerintah Kota Surabaya adalah 9,267.

Jika ada kenaikan satu satuan pada variabel PAD, DAK, DBH, dan DAU maka dapat menaikkan Belanja Daerah masing-masing 0,708; 0,053; 0,175 dan 0,158.

4.1.7 Uji F

Ghozali (2016) menuturkan bahwasannya Uji F tujuannya guna mengetahui secara simultan variabel independen mempengaruhi variabel dependennya. Bila nilai F hitung > F tabel maka semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen, adapun nilai signifikansinya <0,05. Hasil menunjukkan F tabel 4,53 dengan menggunakan rumus tabel = $F(k : n-k)$. Berikut hasil signifikansi secara simultan (Uji-F):

Tabel 7. Uji Signifikansi secara Simultan (Uji-F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,796	4	,199	80,631	,000 ^b
	Residual	,012	5	,002		
	Total	,808	9			

a. Dependent Variable: BD

b. Predictors: (Constant), DAU, DAK, PAD, DBH

Sumber: Output SPSS yang diolah

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwasannya nilai sig. 0,000b < 0,05, adapun hasil nilai F hitung 80,631 > nilai F tabel sebesar 4,53, yang berarti H₀ ditolak, dengan demikian, PAD, DAK, DBH, dan DAU secara simultan mempengaruhi Belanja Daerah.

4.1.8 Uji t

Ghozali (2016) menjelaskan bahwasannya uji t digunakan guna menguji pengaruh variabel independen pada variabel dependennya secara parsial. Bila nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesisnya diterima, apabila >0,05 maka hipotesisnya ditolak. Adapun pengambilan keputusan menggunakan t hitung > t tabel maka svariabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependennya, dan begitupun sebaliknya. Nilai t tabel 2.5705 yang menggunakan formulasi $t(\alpha/2; n-k-1)$. Berikut hasil uji:

Tabel 8. Uji Signifikansi secara parsial (Uji-t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,267	3,955		2,343	,066
	PAD	,708	,103	,846	6,867	,001
	DAK	,053	,040	,266	1,326	,242
	DBH	-,175	,240	-,144	-,732	,497
	DAU	,158	,213	,096	,741	,492

a. Dependent Variable: BD

Sumber: Output SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan berikut:

4.1.9 Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Hipotesa pertama mengindikasikan PAD secara parsial mempengaruhi Belanja Daerah, nilai sig. 0,001 < 0,05 dengan nilai t-hitung 6,867 > 2,570.

4.1.10 Pengaruh DAK Terhadap Belanja Daerah

Hipotesa kedua mengindikasikan DAK secara parsial tidak mempengaruhi Belanja Daerah, nilai sig. $0,242 > 0,05$ dan nilai t-hitung $1,326 < 2,570$.

4.1.11 Pengaruh DBH Terhadap Belanja Daerah

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwasannya DBH secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah dengan nilai signifikansi $0,497 > 0,05$ dengan nilai t hitung sebesar $732 < 2,570$.

4.1.12 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah

Hipotesa ketiga mengindikasikan bahwasannya DAU secara parsial tidak mempengaruhi Belanja Daerah, nilai sig. $0,492 > 0,05$ dan nilai t-hitung sebesar $0,741 < 2,570$.

Uji Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali, 2016) koefisien determinasi (R^2) guna mengukur tingkat kemampuan model guna menerangkan varians variabel dependennya. Hasil pengujiannya yaitu:

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.992 ^a	.985	.973	.04968

a. Predictors: (Constant), DAU, DAK, PAD, DBH

Sumber: Output SPSS yang diolah

Tabel tersebut mengindikasikan bahwasannya diperoleh nilai Adjusted R square $0,973$ ($97,3\%$), artinya X_1, X_2, X_3, X_4 secara simultan mempengaruhi variabel Y yang persentasenya sebesar $97,3\%$ dan $2,7\%$ dipengaruhi oleh variabel lainnya.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1. Pengaruh PAD Terhadap Belanja Daerah

Dari hasil pengujian t bahwa PAD mempengaruhi Belanja Daerah. Pada nilai sig. $0,001 < 0,05$, nilai t-hitung $> t$ -tabel, artinya

secara individual PAD mempengaruhi Belanja Daerah. Dilihat dari kontribusi PAD berpengaruh besar terhadap Belanja Daerah karena tiap tahunnya ada peningkatan yang signifikan dan total PAD tidak berselisih jauh dengan tahun berikutnya yang bernominal lebih besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Devita dkk, 2014), (Fatimah dkk, 2019), (Liando dkk, 2017), (Dermawan, 2017), (Gani, 2013), (Saputri dkk, 2014), (Rahman dkk, 2007), (Ferdiansyah dkk, 2018), (Masdjojo dkk, 2009), (Liando dkk, 2017), (Rahmawati dkk, 2015), (Iqbal dkk, 2020), (Ernayani, 2017), (Nailufar dkk, 2019) dan (Listiorini, 2012).

4.2.2. Pengaruh DAK Terhadap Belanja Daerah

Pengujian t menunjukkan bahwasannya DAK tidak mempengaruhi Belanja Daerah. Pada nilai sig. $0,242 > 0,05$ dan pada nilai t-hitung $< t$ -tabel, berarti DAK tidak mempengaruhi Belanja Daerah. Maka pada hal ini menunjukkan bahwa kontribusi DAK tidak mempengaruhi Belanja Daerah. Ini dapat dilihat pada total jumlah DAK setiap tahun mempunyai total yang sangat jauh dari setiap tahunnya. Pada penelitian ini sejalan dengan (Fatimah dkk, 2019), (Listiorini, 2012) yang menunjukkan bahwasannya DAK DAK tidak mempengaruhi Belanja Daerah.

4.2.3. Pengaruh DBH Terhadap Belanja Daerah

Pengujian t menunjukkan bahwasannya DBH tidak mempengaruhi Belanja Daerah. Nilai sig. $0,497 > 0,05$, nilai t-hitung $< t$ -tabel yang berarti DBH tidak mempengaruhi Belanja Daerah secara parsial. Hasil tersebut mengindikasikan DBH tidak mempengaruhi Belanja Daerah. Ini dapat dilihat pada total DBH pada tahun 2018 hingga 2019 adanya penurunan secara signifikan pada tahun 2018 sebesar Rp. 410.894.374.246,00 dan pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 sebesar Rp. 317.363.050.361,00 dan hal ini juga tidak sejalan total nominal yang ada ditahun sebelumnya dengan jumlah selisih yang cukup banyak. Pada penelitian ini sejalan dengan

(Fatimah dkk, 2019), (Listiorini dkk, 2012) yang menunjukkan bahwasannya DBH tidak mempengaruhi Belanja Daerah. Namun pada penelitian lain tidak sejalan dengan (Yulina, 2017) dan (Hapid dkk, 2015) yang menunjukkan bahwasannya DBH tidak mempengaruhi signifikan pada Belanja Daerah.

4.2.4. Pengaruh DAU Terhadap Belanja Daerah

Pengujian t mengindikasikan bahwasannya DAU tidak mempengaruhi Belanja Daerah. Pada nilai sig. $0,492 > 0,05$ dan pada nilai t -hitung $< t$ -tabel yang berarti DAU tidak mempengaruhi Belanja Daerah secara parsial. Hal tersebut mengindikasikan DAU tidak mempengaruhi Belanja Daerah, yang dapat dilihat pada total jumlah DAU setiap tahun mempunyai total yang sangat jauh dari setiap tahunnya. Penurunan yang cukup signifikan dari untuk tahun 2014-2015, untuk tahun 2014 Rp. 1.200.889.359.000,00 dan untuk tahun 2015 sebesar Rp. 1.147.385.486.000,00. Pada penelitian ini sejalan (Nur, 2015). Namun hasil penelitian bertentangan dengan (Fatimah dkk, 2019), (Gani dkk, 2013) yang menunjukkan bahwasannya DAU tidak mempengaruhi signifikan pada Belanja Daerah.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian diatas, kesimpulan penelitian ini yaitu:

- PAD mempengaruhi Belanja Daerah secara signifikan. Nilai sig. $0,001 < 0,05$ dan pada nilai t -hitung $> t$ -tabel berarti secara parsial atau individual PAD mempengaruhi Belanja Daerah.
- DAK tidak mempengaruhi signifikan pada Belanja Daerah. Nilai sig. $0,242 > 0,05$, nilai t -hitung $< t$ -tabel yang berarti secara parsial DAK tidak mempengaruhi Belanja Daerah.
- DBH tidak mempengaruhi Belanja Daerah. Nilai sig. $0,497 > 0,05$, nilai t -hitung $< t$ tabel yang berarti secara parsial DBH tidak mempengaruhi Belanja Daerah.

- DAU tidak mempengaruhi Belanja Daerah. Nilai signifikansinya $0,492 > 0,05$, t -hitung $< t$ -tabel yang berarti secara parsial DAU tidak mempengaruhi Belanja Daerah.
- Pada Uji F, menunjukkan bahwa secara bersama-sama PAD, DAK, DBH, dan DAU mempengaruhi Belanja Daerah Kota Surabaya dalam periode waktu tahun 2011-2020, yang artinya PAD, DAK, DBH, dan DAU secara simultan (digabungkan) maka sektor Belanja Daerah.

5.2 Saran

Kepada Pemerintah Daerah Kota Surabaya diharapkan senantiasa mencari sumber lain PAD agar tidak menggantungkan pembiayaan dari pemerintah pusat, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tidak hanya PAD, tetapi sektor DAK, DBH, DAU untuk lebih ditingkatkan lagi dengan tujuan supaya daerah mampu mencukupi kebutuhan aktivitas dan program desentralisasi pada setiap daerah. Bagi peneliti berikut perlu menambah variabel independen yang bisa mempengaruhi Belanja Daerah. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan meneliti dan menggunakan sampel daerah lainnya supaya dapat dijadikan perbandingan dengan hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti. Untuk peneliti selanjutnya juga bisa memberikan penjelasan yang lebih mendalam pada data penelitiannya agar pembaca lebih memahani penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dermawan, W.D. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Ilmiah EDUKASI*. 5(2), 153-156.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi J. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(2), 63-70.

- Erlina, Rambe, O.S., dan Rasdianto. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jakarta: Salemba Empat.
- Ernayani, R. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Periode 2009-2013), *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(01), 43-52.
- Fatimah, N.N, Nopiyanti, A & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah, *Equity*. 22(2), 197-214.
- Ferdiansyah, I., Deviyanti., D. R & Pattisahusiwa, S. (2018). "Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah", *INOVASI*, 14 (1) 2018, 44-52.
- Gani, W., & Kristanto, S. B. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Khusus terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera, *Infestasi*, 9(2), 115-122.
- Ghozali Imam & A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati. D. N. (2003). *Basic Econometric (Fourth Edition)*. New York: McGraw-hill.
- Hadi, N. (2014). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Halim, A. & Kusufi, M.S. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4, Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Hapid, H., Halim, M., & Wulandari, Y. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(1).
- Iqbal, M., Abbas, T., & Ratna. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 03(3), 1-15.
- Jensen, M.C., dan W. Meckling. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economics*: 305-360.
- Laksono, B. B., & Subowo, S. (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Daerah, *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Liando, I. I., & Hermanto, S. B. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(6).
- Listiorini, L. (2012). Fenomena Fly Paper Effect Pada Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara, *Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan*, 4(2), 111-126.
- Masdjojo, G. N. Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Serta Analisis Flypaper Effect Kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Jurnal Telaah Manajemen*, 6(1).
- Mulyati, S. & Yusriadi. (2017). Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Provinsi Aceh, *AGREGAT: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 211-220.
- Nailufar, F., & Sutifriyati. (2019). "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Kota Banda Aceh", *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 83-103.
- Nur, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah di Sulawesi Selatan. In *Assets*. Vol. 5, No. 1.

<https://surabayakota.bps.go.id/>

- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan
- Rahman, A. & Kusumadewi, D. A. (2007). "Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia", *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* Vol 11 No 1
- Rahmawati, L.A. (2015). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 4(9): 1-20.
- Rizal, Y & Erpita. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 74-83.
- Rusdianto, U., (2013). CSR Communication A Framework for PR Practitioners, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Saputri, M. A., & Muid, D. (2014). Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kbuupaten/Kota Di Jawa Tengah 2011-2012. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 747-757).
- Setiyawati, A. 2007. Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 211-228.
- Solikin, A. (2016). Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Sisab Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. 16(1), 11-25.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2018a). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Cv. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018b). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta.
- Suwardjono. (2010). Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan, Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Pusat dan Daerah
- Wati, M. R & Fajar, M. C. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung, 1(1), 63-76.
- Yulina, B. (2017). Fenomena Flypaper Effect Pada Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Polsri*, 1(2).